

PENGARUH PENGANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMDA MELALUI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS: PEMDA KAB KUDUS)

Dwi Sudaryanti

Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta
e-mail: sudaryati_dwi@yahoo.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dan pengaruh SIKD terhadap hubungan antara penganggaran dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada seluruh SKPD di Kabupaten Kudus. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 kuesioner atau sebesar 69,44% dari total kuesioner yang disebar sejumlah 72 kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya diuji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier.

Hasil uji kualitas data menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian reliabel dan valid, sedangkan hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang digunakan bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja, namun penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan sedangkan SIKD merupakan salah satu bentuk pengendalian yang digunakan untuk pencapaian kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penganggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Keywords: Kinerja, Penganggaran, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memasuki era perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralistik (Otonomi Daerah) dimulai sejak penetapan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang mengacu pada PP Nomor 105 tahun 2000 dan UU Nomor 25 tahun 1999 mengenai

pengimplementasian model struktur otoritas baru dan rancangan sistem informasi akuntansi yang baru di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Desentralisasi menurut Miah dan Mia (1996) desentralisasi adalah seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengizinkan manajer di bawahnya untuk mengambil keputusan secara independen. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan.

Dengan adanya sistem desentralisasi maka akan menyebabkan pengambilan keputusan di sebuah organisasi harus didelegasikan ke level-level yang lebih rendah. Pendelegasian memberikan otoritas pengambilan keputusan disertai tanggung jawab kepada manajemen di level yang lebih rendah (bawahan) untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. SIKD dipandang sebagai peningkatan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Menurut Arbenethy (2005) desentralisasi merupakan pemberian wewenang dan otoritas kepada manajer sub unit untuk mengambil suatu tindakan yang akan mempengaruhi kemampuan adaptasi dari pihak manajer sub unit.

Menurut Halim (2002) pemerintah memiliki 3 alasan strategis untuk memiliki SIKD antara lain: (a) semakin kompleksnya aktivitas dari pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan roda pemerintahan, (b) semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan menuntut agar pemerintah lebih efektif dan efisien, serta (c) para investor dan kreditor baik luar maupun dalam negeri menuntut adanya informasi yang jelas tentang keadaan daerah yang akan dijadikan penanaman investasinya.

Menurut PP RI No. 56 Tahun 2005, SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Komponen SIKD yaitu 1) input, meliputi seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah

(penerimaan, pengeluaran asset, kewajiban dan ekuitas) yang direkam dalam bukti yang sah sebagai dokumen sumber; 2) proses, meliputi serangkaian prosedur akuntansi untuk mengolah data transaksi keuangan secara sistematis daerah, mulai dari pengumpulan data, analisa, pencatatan dan pengikhtisaran secara sistematis dalam bentuk jurnal dan buku besar sampai penyiapan laporan keuangan; 3) output, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan untuk membantu manajemen tingkat menengah agar dapat mengendalikan instansi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif, sehingga implementasi SIKD merupakan salah satu bentuk pengendalian yang digunakan untuk pencapaian kinerja. Menurut Bastian (2002) implementasi SIKD ditujukan dalam rangka mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Implementasi SIKD diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik.

Terdapat dua hal yang memiliki korelasi kuat dan konsisten dengan diterimanya implementasi sebuah sistem pemanfaatan teknologi informasi yaitu kepuasan pengguna dan kinerja pada tingkat kompetensi sistem tersebut (Mawhinney, 1990) dalam Ahmad (2004). Definisi tersebut dapat diartikan bahwa pemanfaatan dari penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja pihak yang menggunakannya. Berdasarkan definisi tersebut apabila dikaitkan dengan implementasi SIKD maka dapat dikatakan dengan diterimanya implementasi SIKD diharapkan dapat meningkatkan kegunaan sistem dan kinerja aparat pemda.

SIKD merupakan sarana untuk membantu penyusunan anggaran, selanjutnya anggaran yang disusun harus memuat indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Informasi kinerja yang dihasilkan oleh suatu sistem pengukuran kinerja ditujukan untuk keperluan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi, yaitu stakeholder internal maupun eksternal. Namun, tujuan utama pengukuran kinerja

instansi adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal serta alokasi sumber daya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui SIKD. Adapun rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penganggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah SIKD yang diimplementasikan dapat mempengaruhi hubungan antara penganggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah?

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Kinerja

Suatu bisnis (organisasi) seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang benar-benar menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil pencapaian tujuan pada tiap level. Menurut UU No.13 Tahun 2006, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran kinerja untuk setiap bisnis memiliki perbedaan, oleh sebab itu diperlukan kejelian dan pemahaman yang baik dari bisnis agar diperoleh pengukuran kinerja yang benar. Untuk memperoleh ukuran kinerja atau KPI (*Key Performance Indicator*) yang benar perlu dilakukan validasi terhadap KPI yang dibuat. Kemudian apabila KPI tersebut sudah valid, maka KPI dispesifikasikan untuk memudahkan dalam proses pengukurannya. Proses spesifikasi KPI ini dilakukan untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang KPI, tujuan, keterkaitan dengan objectives, target dan ambang batas, formula/cara mengukur KPI, frekuensi pengukuran, frekuensi review, siapa yang mengukur, dan apa yang mereka kerjakan (Suartika *et. al.*, 2007).

2. Penganggaran

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan

pertanggungjawaban kepada publik (Deputi IV BPKP, 2005).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan (Deputi IV BPKP, 2005).

Karakteristik tujuan anggaran secara keseluruhan menghasilkan pengaruh cukup kuat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, karena semakin baik aparat pemerintah daerah turut berpartisipasi dalam menyusun rencana anggaran, melaksanakan anggaran dan menilai sendiri tentang pencapaian anggaran yang telah di tetapkan maka semakin baik kinerjanya (Munawar,2006). Dengan kata lain, apabila penyusunan anggaran dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan anggaran berkualitas dan sebaliknya. Apabila anggaran yang dihasilkan berkualitas, maka instansi akan mempunyai pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kinerja dapat meningkat.

Atas uraian diatas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut :

H_1 : *Penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda.*

3. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Menurut PP No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Penerapan SIKD yang tepat akan sangat membantu penyusunan anggaran yang

berkualitas. Anggaran yang berkualitas, dilihat dari beberapa hal antara lain konsistensi dalam penggunaan dokumen-dokumen penganggaran sesuai aturan yang berlaku, ketertiban jadwal dalam penyusunan anggaran, pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Alimsyah, 2008). Sedangkan diketahui bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan kinerja, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 29 Tahun 2002). Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Aktivitas utama dalam penyusunan ABK adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarnya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Perolehan dan penyajian data kuantitatif juga akan menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis.

Sedangkan proses pengambilan keputusannya melibatkan setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan tersebut akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai. (Deputi IV BPKP, 2005).

Atas uraian diatas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut :

H_2 : *Penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda melalui SIKD.*

METODE PENELITIAN

1. Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan penganggaran, SIKD dan kinerja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di kantor, dinas, badan, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD di Kabupaten Kudus. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kepada Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Mereka adalah sumber informasi penting berkaitan dengan implementasi dan penggunaan SIKD di pemerintah daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada SKPD di Kabupaten Kudus yang menjadi objek penelitian. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan menjelaskan penelitian secara ringkas, serta menjelaskan cara pengisian kuesioner tersebut kepada responden. Responden diberi kesempatan untuk memahami dan mengisi kuesioner sesuai dengan janji yang telah disepakati dengan responden, setelah itu peneliti mengambil kuesioner tersebut. Perolehan data dilakukan selama 4 minggu. Berikut ini ringkasan tingkat respon rate kuesioner yang disebarkan.

Tabel 1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang didistribusikan	72 Kuesioner
Kuesioner yang tidak kembali	18 Kuesioner
Kuesioner yang diterima kembali	54 Kuesioner
Kuesioner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya)	4 Kuesioner
Kuesioner yang lengkap	50 Kuesioner
Tingkat pengembalian (respon rate)	$54/72 \times 100\% = 75\%$
Tingkat pengembalian yang bisa digunakan	$50/72 \times 100\% = 69,44\%$

2. Pengukuran Variabel

a) Kinerja Aparat Pemda

Variabel ini didefinisikan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dicapai oleh aparat Pemda. KPI (*Key Performance Indicator*) yang digunakan oleh Pemda antara lain *input, output, outcome, benefit dan impact*. Variabel ini diukur menggunakan 10 (lima) item pertanyaan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja aparat Pemda. Masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 tingkatan skala Likert (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju).

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dan validitas dari seluruh kuesioner yang diolah *Cronbach's Alpha* untuk variabel kinerja aparat pemda menunjukkan nilai sebesar 0,772, yang berarti variabel ini reliabel dan valid. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa variabel ini bebas dari gejala multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan terdistribusi secara normal.

b) Penganggaran

Variabel ini digunakan untuk mengetahui pengaruh SIKD terhadap kualitas budgeting. Penelitian ini akan menggunakan daftar pertanyaan berisikan 9 (lima) item pertanyaan untuk mengetahui konsistensi dalam penggunaan dokumen-dokumen penganggaran sesuai aturan yang berlaku, ketertiban jadwal dalam penyusunan anggaran dan pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 tingkatan skala Likert (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju).

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dan validitas dari seluruh kuesioner yang diolah *Cronbach's Alpha* untuk variabel penganggaran menunjukkan nilai sebesar 0,686, yang berarti variabel ini reliabel dan valid. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa variabel ini bebas dari gejala multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan terdistribusi secara normal.

c) Sistem Informasi Keuangan Daerah

Variabel ini didefinisikan untuk mengetahui sejauh mana sistem informasi dapat mempengaruhi kinerja aparat Pemda. Variabel ini diukur menggunakan 9 (lima) item pertanyaan dengan tujuan untuk mengetahui pengendalian terhadap input, prosedur dalam proses dan penggunaan output SIKD. Masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 tingkatan skala Likert (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju).

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dan validitas dari seluruh kuesioner yang diolah *Cronbach's Alpha* untuk variabel SIKD menunjukkan nilai sebesar 0,751, yang berarti variabel ini reliabel dan valid. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa variabel ini bebas dari gejala multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan terdistribusi secara normal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Deskripsi dari statistik variabel penelitian ditujukan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden yang menunjukkan rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian meliputi variabel kinerja,

penganggaran dan SIKD. Statistik deskriptif lengkap dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Kinerja (Y)	50	39,36	30	50	3,795
Penganggaran (X1)	50	23,72	17	30	2,634
SIKD (X2)	50	28,34	24	35	2,047

Tabel statistik deskriptif diatas merupakan deskripsi setiap variabel yang dianalisis. Variabel kinerja (Y), pengukuran menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai 5, jumlah pertanyaan 10, dan jumlah data 50 (n=50), diperoleh rata-rata 39,36, nilai minimum 30, nilai maximum 50 dan standar deviasi 3,795. Berarti dapat dikatakan bahwa responden menjawab pertanyaan dengan pendapat setuju, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai oleh aparat Pemda Kudus adalah cukup. Variabel penganggaran (X1), pengukuran menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai 5, jumlah pertanyaan 6, dan jumlah data 50 (n=50), diperoleh rata-rata 27,72, nilai minimum 17, nilai maximum 30 dan standar deviasi 2,634. Berarti dapat dikatakan bahwa responden mempunyai persepsi mengenai pengaruh SIKD terhadap kualitas penganggaran adalah cukup karena jarak mean tidak lebih dekat ke nilai minimum ataupun lebih dekat ke nilai maximum. Variabel SIKD (X2), pengukuran menggunakan skala Likert dari poin 1 sampai 5, jumlah pertanyaan 7, dan jumlah data 50 (n=50), diperoleh rata-rata 28,34, nilai minimum 24, nilai

maximum 30 dan standar deviasi 2,047. Berarti dapat dikatakan bahwa responden mempunyai persepsi mengenai SIKD yang diimplementasikan juga cukup.

1. Hasil Pengujian Kualitas Data

Menurut Hair, *et al* (1998) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

2.1 Uji Reliabilitas

Menurut Sekaran (2000), berdasarkan nilai Alpha, reliabilitas dapat dikategorikan berikut ini. Nilai Alpha antara 0,8 sampai dengan 1,0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai Alpha antara 0,60 sampai dengan 0,79 dikategorikan reliabilitas diterima dan nilai Alpha kurang dari 0,60 dikategorikan reliabilitas kurang baik. Hasil uji reliabilitas variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria Reliabilitas
1.	Kinerja (Y)	0,772	Diterima
2.	Penganggaran (X1)	0,686	Diterima
3.	SIKD (X2)	0,751	Diterima

Hasil pengujian reliabilitas untuk semua butir jawaban kuesioner masing-masing variabel dalam penelitian menunjukkan bahwa nilai Alpha terletak di antara 0,60 sampai dengan 0,79 yang berarti reliabilitas diterima. Dengan hasil Alpha sebesar 0,772 untuk variabel kinerja (Y), 0,686 untuk variabel penganggaran (X1) dan 0,751 untuk variabel SIKD (X2) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa

desain kuesioner untuk masing-masing variabel penelitian adalah reliabel.

2.2 Uji Validitas

Dari sejumlah 23 pertanyaan yang dikelompokkan sesuai dengan variabel yang akan diuji yaitu variabel X1 (Penganggaran) terdapat 6 item pertanyaan, variabel X2 (SIKD) terdapat 7 pertanyaan dan untuk variabel Y (Kinerja) 10

item pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor yang dihasilkan dari setiap item-item dengan skor total item-item. Masing-masing item harus berkorelasi positif terhadap total skor item-item pada tingkat signifikansi 0,01 (1%).

Hasil pengujian validitas variabel independen dan dependen menunjukkan nilai koefisien korelasi antar item-item pertanyaan dengan total skor item-item pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen mempunyai hubungan yang signifikan. Dengan demikian instrumen-instrumen tersebut dapat dinyatakan valid karena masing-masing butir pertanyaan memang mengukur instrumen yang diukur.

3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

3.1 Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan mendeteksi nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel terikat dan diregresi terhadap variabel lainnya *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2006).

Tabel 4.
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	5,193	7,355		,706	,484		
	X1	,269	,173	,187	1,557	,126	,997	1,003
	X2	,980	,223	,529	4,405	,000	,997	1,003

a. Dependent Variable: Y

Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,10 (10%) yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan hal yang sama, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF kurang dari 10, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

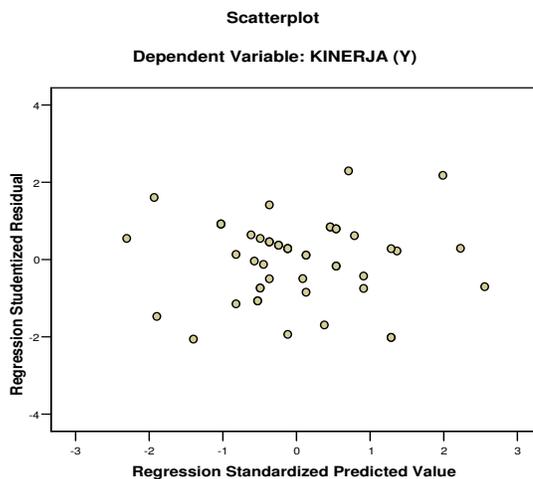
3.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam

penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, digunakan analisis grafik *scatterplot*, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Apabila dari grafik tersebut terlihat pola titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1 menunjukkan bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpecah dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Gambar 1.
Hasil Pengujian



3.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi dalam suatu model regresi linier, model yang baik adalah model yang tidak ada autokorelasi. Penelitian ini menggunakan Durbin-Watson (DW).

Tabel 5.
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,570 ^a	,325	,296	3,184	1,714

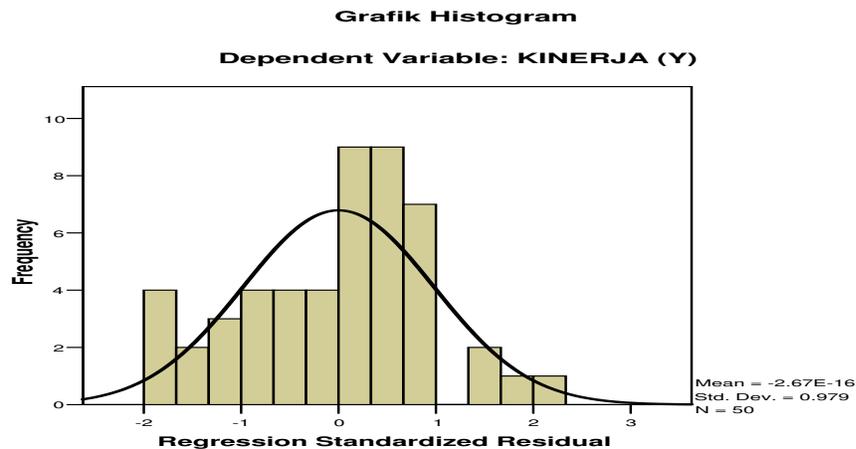
a. Predictors: (Constant), SIKD (X2), PENGANGGARAN (X1)

b. Dependent Variable: KINERJA (Y)

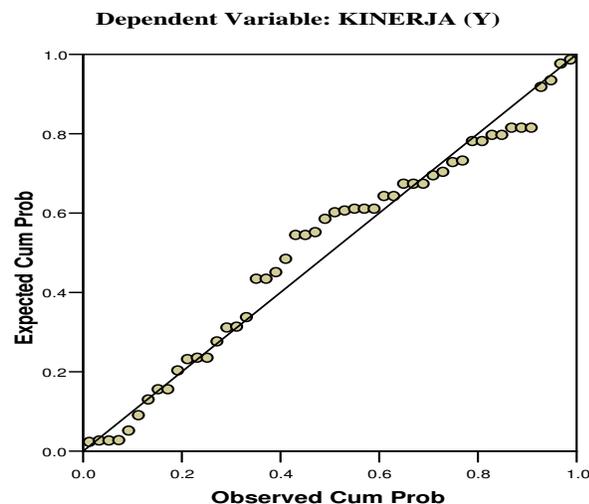
Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan 50 dan 2 variabel independen, sehingga nilai dU sebesar 1,54 dan 4-dU sebesar 2,46. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,714. Dengan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai d terletak diantara batas atas (dU) dan (4-dU), maka koefisien sama dengan nol atau tidak adanya korelasi, berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

3.4 Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penelitian ini menggunakan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot*. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2002).



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari grafik histogram di atas dapat dilihat bahwa garis kinerja mengikuti bentuk distribusi normal dengan bentuk histogram yang hampir sama dengan bentuk lonceng. Pada gambar P-P Plots, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan ditunjukkan dengan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan. Dari grafik ditunjukkan bahwa nilai P-P Plot terletak disekitar garis diagonal. Nilai P-P Plots tidak menyimpang jauh dari garis diagonal, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data adalah normal. Gambar 4.2 dan 4.3

diatas menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal, artinya data ini dapat digunakan untuk melakukan pengujian lebih lanjut.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh antara variabel dependen dengan independen dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*), yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja aparat Pemda Kudus (Y), sedangkan variabel independen adalah penganggaran

(X1) serta SIKD (X2) sebagai variabel moderat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \dots\dots\dots(2)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + \epsilon \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Aparat Pemda
- X₁ = Penganggaran
- X₂ = SIKD
- β = Koefisien regresi
- ε = Variabel pengganggu

Kriteria yang akan digunakan untuk menentukan bahwa variabel SIKD merupakan variabel moderat atau tidak menurut Shrima (1981) dalam Wijayanti dan Solikhin (2005) adalah sebagai berikut: jika persamaan (2) dan (3) secara signifikan berbeda (contoh β₃=0, β₂≠0) maka SIKD bukan merupakan variabel moderator tetapi merupakan variabel *predictor independen*. SIKD dikatakan sebagai

variabel quasi moderator jika persamaan (1), (2) dan (3) berbeda (contoh β₁=0, β₂≠0, β₃≠0), dan disebut sebagai *pure moderator* jika persamaan (1) dan (2) sama tetapi persamaan (3) berbeda (contoh β₂≠0, β₃=0).

Tabel 6 menyajikan ringkasan dari pengujian dengan analisis regresi linier untuk menguji dua hipotesa yang ditentukan. Persamaan 1 menunjukkan hasil pengujian hipotesa 1 yang menyatakan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda. Persamaan 2 dan 3 adalah langkah untuk menentukan apakah variabel SIKD berfungsi sebagai variabel moderating. Persamaan 2 menunjukkan hasil dari pengujian pengaruh dua variabel yaitu penganggaran dan SIKD terhadap kinerja aparat Pemda. Sedangkan persamaan 3 menunjukkan hasil pengujian pengaruh variabel SIKD terhadap hubungan antara penganggaran dan kinerja aparat Pemda.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier

Pers.	Persamaan Regresi	Nilai F Sig	R ²	Tipe
1.	Y = 32,034 + 0,213 X ₁	2,314	0,046	
2.	Y = 5,193 + 0,187 X ₁ + 0,223 X ₂	11,302	0,325	QM
3.	Y = 5,193 + 0 X ₁ + 0,384 X ₂ + 0,243 X ₁ X ₂	11,302	0,325	

Hasil analisis yang ditunjukkan pada persamaan 3 tabel 6 diatas menunjukkan bahwa β₁ = 0, β₂ = 0,265, dan β₃ = 0,517, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa SIKD berfungsi sebagai *quasi moderating* terhadap hubungan antara penganggaran dengan kinerja aparat Pemda.

Uji Statistik t

Uji t dilaksanakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilaksanakan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dapat diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32,034	4,846		6,611	,000
X1	,309	,203	,214	1,521	,135

a Dependent Variable: KINERJA (Y)

Berdasarkan tabel 7 diatas perbandingan antara nilai t hitung koefisien konstanta dengan t tabel, menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel dan nilai Sig yang lebih kecil daripada alpha (5% atau 0,05), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak Ho yang berarti koefisien konstanta adalah signifikan secara statistik. Untuk koefisien X1 (Penganggaran) menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel dan nilai Sig yang lebih besar daripada alpha (5% atau 0,05), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menerima Ho yang berarti koefisien X1 adalah tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penganggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kudus. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Maryanti (2002) menemukan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi

anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran, tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perhitungan regresi menggunakan program SPSS, dilihat dari tabel Anova atau F-test. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara statistik dapat dijelaskan bahwa keseluruhan variabel-variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh nyata terhadap perubahan nilai variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	229,120	2	114,560	11,302	,000(a)
Residual	476,400	47	10,136		
Total	705,520	49			

a Predictors: (Constant), X2, X1.X2

b Dependent Variable: Y

Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 11,302, dengan Sig adalah 0,000. dengan $v_1=2$ dan $v_2=47$, diperoleh nilai F tabel 3,23. Dengan kondisi dimana nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai Sig yang lebih kecil daripada alpha (5%), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak Ho yang berarti koefisien korelasi signifikan secara statistik. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah penganggaran berpengaruh

secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kudus melalui SIKD yang diimplementasikan yang berguna dalam penganggaran untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan kinerja, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui SIKD. SIKD merupakan sarana untuk membantu penyusunan anggaran, selanjutnya anggaran yang disusun memuat indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran.

Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai implikasi bahwa SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) di Kabupaten Kudus sangat membantu dalam penganggaran, sebab informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut membantu dalam mewujudkan anggaran yang berkualitas. Suatu anggaran didalamnya memuat indikator kinerja, sehingga aparat Pemda memiliki pedoman yang jelas tentang tugas yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja yang telah ada.
2. Implikasi lain dari hasil penelitian ini bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui SIKD merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, setiap daerah juga harus meningkatkan kemampuan SDMnya agar dapat memanfaatkan teknologi informasi tersebut secara maksimal.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan diantaranya :

1. Peneliti hanya memasukkan dua variabel yang memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat Pemda yaitu penganggaran dan SIKD. Diduga masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja aparat Pemda.

2. Penelitian ini dilakukan pada organisasi pemerintah yang terbatas pada hanya satu kabupaten padahal di Indonesia ada ratusan kabupaten/kota, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisir karena perbedaan karakteristik obyek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. Parliament's performance in the budget process: A case study. *Policy Matters* 3(2): 1-24. <http://www.irpp.org>.
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting—Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Hagen, Terje P., Rune J. Sorensen, & Oyvind Norly. 1996. Bargaining strength in budgetary process: The impact of institutional procedures. *Journal of Theoretical Politics* 8(1): 41-63.
- Hair JF., Anderson, R.E. Tatham, R.L. and Black W.C. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5 th Edition. New Jersey, Prentice Hall.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. (UPP AMP YKPN).
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.

- Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Disertasi.
- Handoko Hani T. 1992. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE.Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta
- Lee, Robert D. Jr. & Ronald W. Johnson. 1998. Public Budgeting Systems. Sixth edition. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc.
- Mardiasmo. 2002a. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. (Penerbit Andi Yogyakarta).
- Mardiasmo. 2002b. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. (Penerbit Andi Yogyakarta).
- Michael, W. S. dan Troy A. (2000) Finacial Performance Monitoring And Customer Oriented Government: A Case Study. Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management, 12(1), 87-105.
- Munawar. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rubin, Irene S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Samuels, David. 2000. Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary "checks and balances" in presidential systems. University of Minnesota, working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.

Santoso, Purbayu B dan Ashari. 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall)*: 325-353.

Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.

Wilkinson, J.W.; M. J. Cerullo; V. Raval; Bernard WW. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*, Fourth edition. John Wiley & Sons, Inc. New York.